

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PANTAWAN *BUNTING* SEBELUM ACARA PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT ADAT BESEMAH
(Studi Di Kelurahan Kota Baru Lahat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :
HIKMAWATI
NPM : 1721010017**

Jurusan :Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442/2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PANTAWAN *BUNTING* SEBELUM ACARA
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
ADAT BESEMAH
(Studi Di Kelurahan Kota Baru Lahat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :
HIKMAWATI
NPM : 1721010017**

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442/2021**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. masyarakat Kelurahan Kota Baru Lahat dalam melaksanakan tradisi *pantawan bunting* cenderung mengikuti tradisi nenek moyang yang sangat perlu dilakukan. *pantawan bunting* adalah menjamu pengantin oleh kerabat dan tetangga pengantin laki-laki dan perempuan sebelum acara akad nikah perkawinan.

Permasalahan yang menjadi kajian peneliti adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat? dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analitik, populasi dan sampel, berdasarkan jenis sumber data adalah jenis data primer dan sekunder yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan sekunder yaitu data yang mendukung sumber data resmi. metode pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. adapun untuk pengolahan data adalah induktif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menarik dari fakta yang khusus kemudian menjadi umum, analisis data adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* ini dilakukan disetiap acara

perkawinan sebelum melakukan acara akad nikah atau dilaksanakan pada hari *bemasak*. *pantawan bunting* ini bertujuan untuk memberi penghormatan dan memperkenalkan calon *bunting* kepada kerabat-kerabat dan masyarakat. biasanya *pantawan bunting* dilaksanakan pada jam 09.00-15.00, menurut tinjauan hukum Islam, tradisi *pantawan bunting* pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat, bertentangan dengan hukum Islam dan telah melenceng dari Syari'at Islam, karena secara sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa acara ini dilakukan sebelum akat nikah perkawinan. akan tetapi alasan masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini karena bertujuan untuk menghormati calon pengantin, memperkenalkan calon pengantin kesanak famili dan juga mempererat jalin silaturahmi.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Pantawan Bunting.*

ABSTRACT

Marriage is a general *sunnatullah* and applies to the creatures, included humans, animals and plants. that is a way chosen by Allah SWT, as a way for the creatures to reproduce, and preserve their life. the society of Kota Baru Lahat village in carrying out the *pantawan bunting* tradition tend to follow the traditions from their ancestors which is necessary to be done. *pantawan bunting* is an activity for the bride and groom by the relatives and neighbors of the groom and bride before the marriage ceremony.

The problem studied by researchers is how to implement the *pantawan bunting* tradition before the wedding ceremony for the Besemah costum public in the village of Kota Baru Lahat? and how is the apprisial of Islamic law on the *pantawan bunting* tradition before the wedding ceremony for the Besemah costum people in Kota Baru Lahat village? and the purpose of this study was to determine the implementation of the *pantawan bunting* tradition in the Besemah indigenous community in Kota Baru Lahat village and to find out the apprisial of Islamic law against the *pantawan bunting* tradition before the wedding ceremony for the Besemah indigenous community in Kota Baru Lahat village.

The method used in this study is a type of field research ,analytical descriptive, population and sample, based on the type of data source is the type of primary and secondary data, namely primary data obtained directly from the source and secondary data that supports official data sources. the methods of collecting data are observation, interviews, and documentation. as for the data management is inductive, called a study that aims to draw from specific facts then become general, data analysis is qualitative.

The results of the study show that the implementation of the *pantawan bunting* tradition is carried out at every wedding event before the marriage ceremony or the day of *bemasak* is held. *pantawan bunting* aims to pay respect and

introduce *bunting* candidates to relatives and the community. usually, *pantawan bunting* is held at 09.00-15.00. according to the review of Islamic law, the *pantawan bunting* tradition of the Besemah indigenous community in Kota Baru Lahat village is contrary to Islamic law and has deviated from Islamic syari'ah, because it intentionally carried out actions that were prohibited by the teachings of Islam, as already explained that this event was carried out before the marriage contract. however, the reason people still maintain this tradition is because it aims to respect the bride and groom, introduce the prospective bride and groom to their relatives and also strengthen the relationship.

Keywords: *Islamic Law Review, Pantawan Bunting Tradition.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmawati
NPM : 1721010017
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pantawan Bunting* Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat)”** adalah benar - benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret, 2021

Penulis



Hikmawati

Npm: 1721010017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pantawan Bunting* Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat).
Nama : Hikmawati
NPM : 1721010017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.


Arif Fikri. S.H.I., M.Ag.

NIP. 195904161987031002

NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 1974092020031221003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pantawan Bunting Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat)"** disusun oleh **Hikmawati, NPM : 1721010017**, Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah). Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa/ 22 Juni 2021** Waktu : 13.00-15.00WIB, Tempat: Ruang C 5 Fakultas Syari'ah

Tim Penguji

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji Utama : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Penguji II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ

وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

“Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka.” (QS.An-Nisa (4): (39))

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, serta membekaliku dengan ilmu. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kezaman yang penuh ilmu. Yang mana dengan izin Allah SWT ku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti dan cintaku kepada orang-orang yang selalu memberikan makna dalam hidup saya terutama untuk:

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Zulkifli dan Ibu Ramayati yang amat saya cintai dan sayangi. bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga yang telah merawat, mendidik, membesarkan saya dengan segala cinta dan kasih yang tak kan pernah terbalaskan membiayai pendidikan hingga sampai sekarang, disetiap sujud dan sepertiga malam selalu mendoakan keberhasilan saya dukungan kalian telah menghantarkan sampai ketitik ini, yang tidak dapat saya balas dengan apapun hanya selembar kertas bertuliskan kata tercinta dan persembahan, semoga ini menjadi langkah awal untuk menjadi lebih baik kedepannya.
2. Untuk kakek dan nenek saya, Abuhasan dan Siti Sulna, Tunak dan Alm.Darmi yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
3. Untuk ayundaku Pera Herawati, S.Hum dan kedua adikku Khadafi Muhammad dan M. Zikri yang selalu mendukung, memberi senyum serta doa untuk saya.
4. Untuk Keluarga besar yang saya sayangi.
5. Untuk Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Hikmawati lahir di Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 22 April 1999. Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Ramayati, Adik Kedua dari Pera Herawati S.Hum, Ayunda dari Khadafi Muhammad dan M.Zikri. Sebelum masuk kejenjang Perguruan Tinggi Negeri Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 06 pada Tahun 2005-20011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTSN Pajar Bulan Semende Darat Ulu pada Tahun 20011-2014. Lalu kembali melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Unggul Lahat pada Tahun 2014-2017. Selanjutnya Penulis Melanjutkan Pendidikan S-1 Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.

Selama Kuliah penulis mengikuti kegiatan wajib Hukum Keluarga Islam (AS) yaitu Kuliah Ta'aruf (kulta), dan mengikuti proses pembelajaran dari semester 1-6. Pada semester 7 penulis melaksanakan KKN-DR di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, serta mengikuti PKL di KUA Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun esktra Fakultas Syaria'h UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobi'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta ini dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Ihsan. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat)”, dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setiap semoga kita mendapatkan syafa’at-nya di hari kiamat nanti.

Penulisan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. dan sekaligus sebagai Pembimbing 1 Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung..
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Arif fikri, S.H.I., M.Ag. Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah, ibu, kakek, nenek, ayuk, adik, keluarga besarku, Keluarga besar wak Mursilahwati, terimakasih atas doa dan

dukungannya. Semoga Allah senantiasa membelasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
9. Sahabat-sahabatku Susi Nilasari, Ayu Rezki, Wuwun Ayu Kristina, Hasmita Robiatul Aini, Gina Shella, Angga jaya yang selalu menyemangati, memotivasi dan menemani disaat bimbingan skripsi dan telah membantu sejauh ini. Teman-teman kosant Sepriani, Dea, Esti, Tio, Karmila, Ranti, Tiara, terimakasih selalu menyemangati dan serta bantuan sampai sejauh ini. Sahabat-sahabaku, Shella Andari Putri, Annisa Fitri, Resi Ema Damayanti, Ayu Selvi, Reren Ariska, Septa Hariani, Nur Asiah, Hariza Utami, Nurmalia, Novianti, Ratih Nurazizah, Ira Widiyawati.
10. Teman-teman KKN-DR kelompok 141 dan teman KKN-DR Desa Pajar bulan, Izza dan Sepriani, Desti.
11. Teman-teman seperjuanganku Kelas E Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017.
12. Teman-teman PPS Kelompok 39.
13. Teman-teman Pengurus HMP Hukum Keluarga Islam Periode 2019-2020.
14. Teman-teman Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini untuk kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

**Bandar Lampung,
25 Maret, 2021**

**Hikmawati
NPM.1721010017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam	
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	29
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	37
B. Masyarakat Hukum Adat	
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	43

2. Faktor- Faktor yang Menentukan Masyarakat Hukum Adat.....	45
3. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	45
C. <i>'URF</i>	
1. Pengertian <i>'Urf</i>	51
2. Landasan Hukum <i>'Urf</i>	52
3. Macam- Macam <i>'Urf</i>	53
4. Syarat- Syarat <i>'Urf</i>	55
5. Kehujjahan <i>'Urf</i>	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Kelurahan Kota Baru Lahat	57
2. Keadaan Geografis Dan Demografi Kelurahan Kota Baru Lahat	58
3. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Kelurahan Kota Baru Lahat	59
B. Tradisi <i>Pantawan Bunting</i> Sebelum acara perkawinan pada Masyarakat Adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat	
1. Prosesi Tradisi <i>Pantawan Bunting</i>	62
2. Tujuan Tradisi <i>Pantawan Bunting</i>	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi <i>Pantawan Bunting</i> Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Pantawan Bunting</i> Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Riset	84
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian	87
Lampiran 3. Pedoman Observasi	90
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	91
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	93
Lampiran 6. Blangko Konsultasi Skripsi	99
Lampiran 7. Hasil Turnitin	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan Skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul Skripsi ini yakni: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pantawan Bunting* Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat).

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu kegiatan meninjau (menyelidiki), pendapat, pandangan yang peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuannya berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'andan hadist.¹

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.²

Secara *etimologis* perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat' *anal-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

Secara *terminologis* perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan

¹ Sitjipto Raharji, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), h. 38.

² Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hal. 4.

seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau seperti sebab sesusuan.³

Adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁴

Pantawan adalah menjamu pengantin oleh kerabat dan tetangga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kata *pantawan* berasal dari kata *pantaw* (bahasa Besemah) yang bersinonim dengankata-kata ajakan, panggilan, dan undang. Kata *pantawan* setelah dibubuhi akhiran –an menjadi *pantawan*.⁵

Bunting (pengantin) adalah sebutan untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶

Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Amir Syarifudin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁴Yulia, *Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 14.

⁵Rois Leonard Arios, “Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantawan Bunting Dalam Suku Bangsa Besemah di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan,” *Patanjala* 11, no.3 (2019): 471. <http://ejournalpatanjala.kemdikbut.ig.id/patanjala/index.php/patanjala/artikel/download/537/pdf>.

⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 6.

bela pihak secara timba balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁷

Menurut sebagian ulama Hanafiah. “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut mazhab Maliki, “Nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Olerh mazhab Syafi’i, “Nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*; atau keturunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama hambali mendefinisikan nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang). Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. Seseorang akan merasakan adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

Allah SWT Menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling bepasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedangkan bagi isteri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung

⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

tuntunan agar kehidupan keduanya dapat melangsung kehidupan serta mengembangkan keturunannya.⁸

Perkawinan adalah salah satu fitra manusia yang merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan prose tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.⁹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, maksud yang dimuliakan Allah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹⁰

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu sosial, akan tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹¹ Sahnya perkawinan,

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahbab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya), 9.

⁹Nasruddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugera Utana Raharja, 2018), 1.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahbab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 39.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Grapika Prss, 2012), 2.

menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.

Menurut pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinannya sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah.

Masyarakat Kelurahan Kota Baru Lahat dalam melaksanakan adat *pantawan bunting* cenderung mengikuti tradisi nenek moyang yang sangat perlu dilakukan. *pantawan bunting* adalah menjamu pengantin oleh kerabat dan tetangga pengantin laki-laki dan perempuan sebelum acara perkawinan.

Masyarakat adat Besemah mengenal berbagai *pantawan* sesuai dengan kepentingan dan tujuan *pantawan* tersebut. Akan tetapi *Pantawan bunting* merupakan tradisi yang populer diantara berbagai jenis *pantawan* dalam adat Besemah.¹²

Kelurahan Kota Baru Lahat, pada dasarnya adalah suatu Kelurahan yang dikatakan kelurahan sudah maju. Penulis dapat mengatakan hal tersebut karena memang pada kenyataannya bahwa Kelurahan Kota Baru Lahat telah mengikuti era modern baik dari segi alat elektronik maupun transportasi. Meskipun telah dikategorikan modern tradisi adat *pantawan bunting* di Kelurahan Kota Baru Lahat tidaklah

¹²Rois Leonard Arios, "Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantawan Bunting Dalam Suku Bangsa Besemah di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan," *Patanjala* 11, no.3 (2019): 471. <http://ejournalpatanjala.kemdikbut.ig.id/patanjala/index.php/patanjala/artikel/download/537/pdf>.

terkebelakangan oleh zaman. inilah alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian berupa: Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat)”. Fokus Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota baru Lahat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan keilmuan khususnya berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada masyarakat mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang adat *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Kelurahan Kota Baru Lahat khususnya dan bagi semua pihak yang melakukan tradisi *pantawan bunting*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada penelitian yang memperbincangkan masalah Adat, diantaranya.

1. Penelitian oleh Emi Lestari Program studi Hukum keluarga Islam Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, Permasalahan dalam penelitian ini, terletak pada tiga titik bahasan, yaitu: Pertama, Prosesi peminangan adat melayu jambi yang mengharuskan adanya *Tepah Sirih* di desa majelis hidayah kecamatan kuala jambi kabupaten tanjung jabung timur. Kedua, Kedudukan *tepah sirih* dalam peminangan adat melayu jambi. Ketiga, Prespektif Hukum Islam tentang keharusan *Tepah Sirih* dalam prosesi peminangan adat melayu jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai, Prosesi peminangan adat melayu jambi yang mengharuskan adanya *tepak sirih* di desa mejelis hidayah kecamatan kuala jambi kabupaten tanjung jabung timur, kedudukan *tepak sirih* dalam prosesi peminangan adat

melayu jambi, prespektif hukuim Islam pada prosesi peminangan keharusan *tepak sirih*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Praktik prosesi peminangan yang mengharuskan adanya *tepak sirih* adalah merupakan adat melayu jambi yang mana *tepak sirih* merupakan keharusan bagi masyarakat melayu jambi dalam setiap acara-acara penting dan peminangan merupakan salah satu rangkaian acara penting sebelum dilaksanakannya perkawinan oleh karena itu adanya tepak sirih diharuskan dalam prosesi peminangan dan juga isi *tepak sirih* itu adalah berupa sirih, kapur, tembakau, pinang, gambir, rokok, kodet, dan uang seratus dua puluh lima rupiah, serta *tepak* yang dibungkus dengan kain dan diberi sanggul berbentuk silang, kedua belah pihak wajib menyiapkannya dalam prosesi peminangan itu setelah kedua belah pihak akan bertukar sirih untuk dimakan oleh masing-masing pihak.

Kedudukan *tepak sirih* dalam prosesi peminangan adat melayu jambi selain didasari oleh kebiasaan masyarakat melayu jambi yang mengharuskan sirih dalam setiap acara penting hal mendasari keharusan adanya *tepak sirih* dalam prosesi peminangan adalah bertujuan agar *tepak sirih* sebagai penanda bahwa pinangan dari laki-laki diterima oleh pihak wanita dengan cara ketika *tepak sirih* sudah saling bertukar dan ada perwakilan dari kedua belah pihak memakan sirih yang dibawa, dalam hal keharusan adanya *tepak sirih* ini tidak hanya diharuskan untuk pihak laki-laki saja namun juga pihak perempuan harus menyiapkan *tepak sirih* yang mana isinya seperti yang dibawa oleh pihak laki-laki dan dalam hal ini pula bagi pihak laki-laki yang tidak membawa *tepak sirih* atau ada beberapa isi dari *tepak sirih* yang kurang maka akan dipersilakkan pulang terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan yang kurang tersebut dan diperbolehkan pulang kembali besoknya adat seperti ini merupakan adat khas melayu jambi.

Praktek prosesi peminangan yang mengharuskan *tepak sirih* adalah sebuah adat yang mana dalam hukum Islam digolongkan sebagai *urf' shahih* yaitu adalah adat yang berlaku disuatu tempat dan tidak bertentangan dengan agama dan syara.

2. Penelitian Irmayati, Program Studi Hukum Acara Peradilan dan kekeluargaan jurusan peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada empat titik bahasan. Pertama, proses adat sebelum prosesi akad nikah di kecamatan masalle Kabupaten enrekang. Kedua, proses adat sementara prosesi akad nikah di kecamatan masalle kabupaten enrekang. Ketiga, proses adat *mossombo* setelah proses akad nikah di kecamatan Masalle Enrekang. Keempat, pandangan hukum Islam terhadap adat *mossombo* pada prosesi akad nikah di kecamatan masalle kabupaten enrekang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai, proses adat sebelum prosesi akad nikah di kecamatan masalle kabupaten enrekang, proses adat sementara prosesi akad nikah di kecamatan masalle kabupaten enrekang, proses adat *massombo* setelah proses akad nikah di kecamatan masalle kabupaten enrekang, pandangan hukum Islam terhadap adat *Massombo* pada prosesi akad nikah di kecamatan masalle kabupaten enrekang.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konsep perkawinan menurut Islam, Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah yang shahih (sesuai dengan pemahaman para salafus shalih) yaitu khitbah atau meninang, akad nikah, dan walimah.

Pelaksanaan adat istiadat perkawinan masyarakat kecamatan masalle kabupaten enrekang, masyarakat masalle pada umumnya masyarakat yang menganut satu agama yaitu agama Islam. Pada umumnya masyarakat ini

cinta akan tradisi perkawinan namun, bukan berarti adat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai syarat-syarat atau rukun perkawinan akan tetapi ada saja tradisi yang dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam.

Adat masyarakat kecamatan masalle sesudah perkawinan (*massombo*), acara ini dilakukan setelah tiga hari setelah prosesi. Akan tetapi alasan masyarakat tetap mempertahankan adat ini karena bertujuan supaya kedua mempelai wanita dan pria tidak mengalami sakit-sakitan. Oleh karena itulah adat yang dilakukan masyarakat kecamatan masalle tersebut telah melenceng dari syari'at Islam, karena memintak perlindungan selain Allah SWT.

3. Penelitian Muhammad Syarifudin, Program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-ilmu syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada dua titik bahasan, yaitu: Pertama, Praktek serta tradisi sohongan bagi para pemuda yang kesulitan dalam hal biaya untuk menikah di desa cilibur. Kedua, Hukum Islam memendang tradisi sohongan yang ada di desa cilibur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai, Praktik tradisi *sohongan* yang berkembang di desa cilibur serta dampak yang ditimbulkan dari praktik *sohongan* ini terhadap pemuda yang sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan, Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *sohongan* dalam membantu pemuda yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan di desa cilibur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Tradisi *sohongan* adalah sebuah tradisi untuk membantu biaya menikah bagi seorang hendak menikah atau orang tua yang hendak menikahkan anaknya. *Sohongan* itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni bantuan (*sohongan*) yang diberikan kepada pemuda kepada calon pengantin dan *sohongan* yang diberikan oleh orang tua kepada orang tua calon pengantin. Bantuan yang diberikan sebagai *sohongan*

antara pemuda dan orang tua pun berbeda. Jika *sohongan* yang diberikan oleh pemuda pada umumnya berupa uang atau rokok sedangkan *sohongan* yang diberikan oleh orang tua biasanya berupa *lawuh medang* (anekah makanan ringan), bumbu-bumbu dapur yang meliputi gula merah dan minyak gorang dan uang, masing-masing yang diberikan sesuai *sohongan* memiliki manfaat yang berbeda-beda dari yang bersifatnya sebagai alat suguhan untuk para tamu dan untuk memasak berbagai masakan yang nanti diberikan kepada teman, tetangga atau kerabat yang datang untuk kondangan maupun dalam prosesi ijab kabul. Adanya tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat desa cilibur sangat membantu para pemuda yang sudah mempunyai niatan untuk menikah.

Tradisi *sohongan* dalam pernikahan yang berkembang di desa cilibur tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika tradisi ini didasari dengan rasa ikhlas hanya untuk mencari keridaan Allah SWT, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan gesekan atau perselisihan diantara masyarakat. Pada dasarnya akad dari *sohongan* adalah akad hibah atau termasuk dalam akad sedekah sehingga tidak perlu ada tuntutan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan. Karena dalam Islam memintak kembali sesuatu yang telah disedekahkan atau dihibahkan hukumnya adalah haram. Namun jika akad dari *sohongan* tersebut bergeser menjadi hutang piutang maka pengembalian yang melebihi dari pada yang dulu diterimanya menjadi suatu yang haram karena pengembalian yang melebihi tersebut ternasuk kedalam riba sehingga tradisi *sohongan* dengan akad hutang piutang menjadi bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti sama-sama meneliti tentang adat

perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti.

Dengan demikian, meskipun diatas disebutkan tidak adanya penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Menurut Koenjoro Diningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan

¹³Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket; VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat).

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh, ada pun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat kelurahan kota baru lahat mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan serta dokumen-dokumen terdahulu atau disebut juga data tersedia yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008), 2.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), 115-116.

acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah (Studi di Kelurahan Kota Baru Lahat).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.¹⁶ Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan objek adalah keseluruhan masyarakat Kelurahan Kota Baru Lahat yang melaksanakan tradisi *pantawan bunting* yang mayoritas penduduk Kelurahan Kota Baru Lahat masih melaksanakan tradisi *Pantawan Bunting* tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu data purposive sampling memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana yang dikemukakan kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 orang warga Kelurahan Kota Baru Lahat, 2 orang pengantin, 2 tokoh adat Kelurahan Kota Baru Lahat dan 2 orang pemuka Agama kelurahan Kota Baru Lahat, Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian *provesif* sampling yang dianggap *refresentatif* dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁶Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 116.

¹⁷Suharsini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renaka Cipta, 1996), 104.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literature maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan, untuk meneliti khususnya yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁹ Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah tokoh adat, pemuka Agama, pengantin dan masyarakat Kelurahan Kota Baru Lahat.

c. Dokumentasi

¹⁸Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 173.

¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya.²⁰Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya.Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap,sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis,tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua dan seterusnya).
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara terarur,berurutan,logissehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

6. Teknik Menganalisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu.Dalam analisis kualitatif

²⁰Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandunmg: PT. Citra Aditiyah Bakti, 2004), 90-91.

digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menandai kejadian yang khusus.²²

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Pada bab pertama memuat Pendahuluan. yang mana didalamnya terdapat, Penegasan judul yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada didalam judul penelitian ini, didalam bab ini juga terdapat latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti, selain itu, dalam bab ini berisi fokus dan sub fokus penelitian yang berisikan perhatian peneliti, selain itu, dalam bab ini berisi rumusan masalah yang berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian dalam bab ini berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan peneliti ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Selanjutnya bab ini berisi Kajian penelitian terdahulu yang relevan, dalam kajian penelitian terdahulu ini berisi mengenai hasil penelitian- penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya bab ini berisi metode penelitian, terlebih dahulu akan dibahas mengenai metode atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian,

²²Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 40.

subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Kemudian pada bab kedua, memuat landasan Teori, yang mana didalamnya terdapat. Perkawinan dalam hukum Islam, yakni suatu yang berisikan pembahasan mengenai perkawinan dalam Islam. Selanjutnya berisikan pembahasan perkawinan dalam hukum adat, yang pembahasannya perkawinan hukum adat, bab ini ditutup dengan pembahasan *Ur'f* pembahasan yang berupa pandangan Islam.

Kemudian bab ketiga, memuat deskripsi objek penelitian, bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, sub bab yang pertama berisi tentang gambaran umum daerah penelitian mengenai letak geografis dan demografis, serta gambaran kondisi sosial masyarakat tempat penelitian. Sub bab kedua berisikan panyajian fakta dan data penelitian, yang berisikan Tradisi *Pantawan Bunting*.

Kemudian bab ke empat, memuat Analisi Penelitian, yang terdiri dari 2 sub bab. Sub bab yang pertama berisi pelaksanaan tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat . Selanjutnya sub bab kedua berisikan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.

Kemudian bab terakhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab ke lima yang berisi perihal Kesimpulan dari hasil analisis terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pantawan bunting* sebelum acara perkawinan pada masyarakat adat Besemah di Kelurahan Kota Baru Lahat. Selain itu, pada bab ini berisi mengenai rekomendasi terhadap praktik tradisi *pantawanbunting* yang dapat menjadi pertimbangan agar tradisi yang sudah berkembang sejak dahulu ini menjadi suatu

alternatif menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi *pantawan bunting* tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

Dapat dilihat dari segi fungsinya perkawinan Dalam Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam keputusan hukum Islam, disebut fiqh munakahat, yaitu ketentuan- ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fiqh, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (*wata*). Dan (2) arti menurut hukum adalah akat atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²³

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitra manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya. Perkawinan juga merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami dan isteri. Perkawinan juga media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri.

1. Pengertian Perkawinan

Secara *etimologis* kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu,

²³Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 68.

bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan, kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.²⁴

Secara *terminologis*, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami- istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyadan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.²⁵

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut

²⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23.

²⁵*Ibid.*, 24.

juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁶ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan; Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam Firman Allah sebagai berikut:

سَتَىٰ النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَإِنَّكِ حُورًا لَّيْتَنِي فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
إِلَّا كَأَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَوَا حِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبْعَ وَتُلْتَمَ
تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim(bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya..”
(Q.S. An-Nisa (4) :3)

²⁶Abdul, Ramhan Ghazali, *Fiqih Munakahat* , (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Undang- Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dalam Pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudratdan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكُنِّي أَنَا أَصْلَبِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ الْبَسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi saw. memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.”
(Muttafaqun ‘Alaih)

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh: “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka”.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang, laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa, dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.²⁸

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia, pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. sebagaimana Allah Swt berfirman :

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

²⁸Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Lampung: LP2M Institut Agama Islam, 2016), 34.

مُوجَعَلٍ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقًا أَنْ يَبْتَغِيََ وَمِنْ
 ﴿١١﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوْدَّةً بَيْنَكَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum (30) : 21)

Firman Allah Swt.

﴿١٩﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا سَتِيَّ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Qs. Adz- Dzariyat (51) : 49)

Dasar Hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al- Qur'an

Firman Allah SWT:

﴿١٧﴾ كُونُوا إِنْ وَأَمَّا بِكُمْ عِبَادُكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
 ﴿١٧﴾ عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ

“Dan kawinkannlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

nya. Dan Allah akan luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui.” (Qs. An-Nur (24): 32)

b. Menurut Hadist:

Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)

Berdasarkan Keterangan nas diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Perkawinan yang merupakan *sunnahtullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatiran dirinya melakukan perbuatan zina manakalah tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghidarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak

dapat dilakukan dengan baikkecuali dengan jalan nikah, maka nikah menjadi wajib untuk orang seperti ini.²⁹

Senada dengan pendapat ini ulama malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan manakalah ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

b. Sunnah (dianjurkan atau *az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan berkemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Maka dalam hal seperti ini nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.³⁰

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan atau disunnahkan, bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah³¹ dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisikal maupun finansial), walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak

²⁹*Ibid*, 47.

³⁰Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Lampung: LP2M Institut Agama Islam, 2016), 48.

³¹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 4

khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemasalahatan dunia dan akhirat

Al-Qurtuby berkata: “Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya.”Demikian sebaliknya.³²

³²Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 22.

d. Makruh

Hukum Menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwatnya itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Para Ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya. Adapun ulama dari kalangan As-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada isterinya.³³ Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi ia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.³⁴

e. Mubah (ibahah)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat dan rukun

³³*Ibid.*, 23.

³⁴Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: LP2M Institut Agama Islam, 2016), 50.

perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dalam perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa ada salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat-hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat- syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.³⁵

a. Rukun Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama Rukun perkawinan ada lima yaitu:

- 1) Calon suami,
- 2) Calon Isteri,
- 3) Wali Nikah,
- 4) Dua orang Saksi, dan
- 4) Ijab Kabul.³⁶

b. Syarat Perkawinan

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun- rukun nikah, sebagai berikut:³⁷

- 1) Syarat Mempelai Laki-laki, yakni:
 - a) Tidak ada Hubungan mahram dari calon Isteri,
 - b) Kemauan Sendiri (Merdeka),
 - c) Jelas Identitasnya,
 - d) Tidak Sedang menjalankan ikhram.
- 2) Syarat Mempelai Perempuan, yaitu:
 - a) Tidak ada halangan syar'i,
 - b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah,
 - c) Tidak ada hubungan mahram,
 - d) Tidak dalam keadaan iddah,
 - e) Kemauan sendiri (merdeka),

³⁵*Ibid.*, 61.

³⁶*Ibid.*, 62.

³⁷Narsuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 16.

- f) Jelas identitasnya,
- g) Tidak sedang menjalankan ihram.³⁸

Dalam Komplikasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:³⁹

- a) Untuk kemasalahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Tahun 1974. Namun, pada tahun 2019 batas usia perkawinan antara calon suami dan istri disama ratakan menjadi 19 tahun.
- b) Perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

³⁸Narsuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 16.

³⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 40-41.

- d) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak dapat halangan perkawinan.

c. Syarat Wali

Adapun syarat wali, yaitu:

- 1) Laki- laki,
- 2) Baligh,
- 3) Sehat Akal,
- 4) Tidak dipaksa,
- 5) Adil,
- 6) Tidak Sedang ibadah ihram.⁴⁰

Perwalian dalam perkawinan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemasalahatannya sendiri.⁴¹ Berikut urutan wali menurut lima iman, yaitu:

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika ia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut- turut, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah,, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah , paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memengang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekali pun hasil zina) mana kalah wanita tersebut punya anak, lalu

⁴⁰Narsuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 16.

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 345.

berturut-turut. Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.

Sementara itu, urutan yang digunakan syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.⁴²

Hambali memberikan urutan. Ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.

Sementraa itu, Imamiyah mengatakan bahwa perwalian itu hanya di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah. Serta dalam kasus-kasus tertentu hakim. Baik ayah maupun kakek dari pihak ayah, mempunyai hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anak laki-laki dan perempuan kecil. Juga terhadap orang yang sudah baliqh tapi gila atau idiot (safih) bila mereka itu gila atau idiot sejak kecil. Akan tetapi bila ketika baligh mereka itu berakal sehat, lalu gila menjadi idiot, maka ayah dan kakek tidak punya hak perwalian atas kedua jenis orang tersebut, tapi perwaliannya dipindahkan ke pada hakim, sekalipun ayah dan kakeknya masih ada. Kalau ayah memilih seseorang (sebagai wali mereka), sedangkan kakeknya memilih orang yang lain, maka yang didahulukan adalah pilihan kakeknya.

Persyaratan wali menurut pasal 20 Komplekasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh.⁴³

⁴²*Ibid.*, 347.

⁴³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 43.

1) Kedudukan Wali.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan oleh wali. Wali itu ditetapkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip

2) Jenis-Jenis Wali

a) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁴⁴

b) Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wali yang mendapat prioritas utama diantara wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak

⁴⁴*Ibid.*

ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayah ayahnya), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat (*ashabah*) yang lain.⁴⁵

d. Syarat Saksi

Adapun syarat saksi, yaitu:

- 1) Laki-laki,
- 2) Baligh,
- 3) Sehat Akalnya,
- 4) Adil,
- 5) Mendengar dan Melihat,
- 6) Tidak dipaksa,
- 7) Tidak sedang ibadah ihram,
- 8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.⁴⁶

Ketentuan saksi dalam kompikasi hukum Islam, yaitu:⁴⁷

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
- 3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Syarat ijab qabul

Adapun syarat ijab dan qabul, yaitu:

- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki

⁴⁵*Ibid.*, 45.

⁴⁶Narsuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 16.

⁴⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 46.

atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.

- 2) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁴⁸

Ketentuan Kompelikasi Hukum Islam tentang akad nikah (Ijab dan qabul) adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu
- 2) Akat nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain
- 3) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu upacara qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal ini calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁸ Narsuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 17 .

⁴⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 46-47.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangkan mendirikan keluarga yang harmonis,⁵⁰ sejahterandan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.⁵¹

jumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu, sebagai berikut:

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
- 2) Bertujuan untuk regenerasi dan atau pengembang biakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* Agama Islam
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)
- 4) Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- 5) Bertujuan ibadah,

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Tujuan pernikahan, yaitu:

- a) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya,

⁵⁰Abdul Azizi Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahad*: (Jakarta: Amzah, 2014), 39.

⁵¹Khoirul Abrar, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung; LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 59.

tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.

- b) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba- hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti nabi-nya sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c) Menjaga nasab, yang dengannya terwujud pengenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e) Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan diantara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f) Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami istri, yang menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan

menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.⁵²

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci diatas tadi, setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada ketuhanan yang maha esa. Dalam kenyataannya, berdasar pada hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu bukan juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenaipembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kunatitatif sementara tujuan perkawinan yang berpredikatbahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali, hal ini terbukti dan banyaknya terjadi perceraian.⁵³

b. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmanya adalah agar supaya manusia hidup berpasang- pasangan, hidup suami isteri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.⁵⁴

Demikian salah satu hikmah, Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengakatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah, akhirnya membentuk satu keluarga yang sakinah, mawadah, dan wa rahmah, dan melahirkan keturunan yang baik dan berguna bagi dirinya, lingkungan. Keluarga dan

⁵²*Ibid.*, 29.

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 86.

⁵⁴Nasruddin, *Fiqih Munakahat* ,(Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 23.

masyarakatnya.⁵⁵ Sebagaimana Firman Allah berikut ini:

جَهَامِنَهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبِّكُمْ أَتَقُوا النَّاسُ يَتَأَيُّهَا
لَا رَحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ أَتَقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرُو
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَ

“sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S An-Nisa (4):1)

Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:⁵⁶

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama- sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-

⁵⁵*Ibid.*, 24.

⁵⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),

masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu, dengan alasan itulah nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjaga ketentraman dan dunia semakin makmur.

- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan. Sebagai yang dikehendaki dalam firman Allah:⁵⁷

أَلَيْسَ لَكُنَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ

اللَّهُ دَعَا أَثْقَلَ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِيفًا حَمَلًا حَمَلَتْ تَغْشَاهَا فَلَمْ

الشَّكْرِينَ مِنْ لَّنْ كُونَنَّ صَالِحَاءِ اتَّيْتَنِ الْإِنِّ رَبَّهُمْ

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian takkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang

⁵⁷Ibid., 66.

saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyuku". (Qs. Al- A'raf (7): 189)

- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi, yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan, adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya, didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai istri dan tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok- pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. hal semacam ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.⁵⁸
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik yang sedikit, pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apa bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmahperkawinan itu antara lain, menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja

⁵⁸*Ibid.*, 67.

keras, pengaturan hak- dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.⁵⁹

B. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubunganinter personalmaupun hubungan antar kelompok sosial.⁶⁰

maka didalam bagian ini akan diusahakan untuk menjelaskan tentang masyarakat hukum adat, dengan berpegang pada paradigma tertentu, atas dasar paradigma tersebut, akan dijelaskan perihal, bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, dengan mengetengahkan contoh-contoh dari keadaan nyata berdasarkan hasil-hasil kegiatan para peneliti yang telah mengungkapkan kenyataan tersebut didalam lapotan-laporan penelitian atau hasil karya lainnya.⁶¹

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Menurut Te Haar, didalam bukunya yang berjudul "*beginnselen en stelsel van het adatrecht*", Terjemahan bebasnya adalah kelompok- kelompok teratur yang bersifat *ajeg* dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda material maupun immaterial sudah tentu rumusan yang sangat pendek itu, didahului dengan suatu penjelsan yang panjang lebar, disertai dengan contoh-contoh dari berbagai daerah di Indonesia. Penjelasan Ter Haar tersebut,

⁵⁹*Ibid.*, 72.

⁶⁰Soerjono Suekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 91.

⁶¹*Ibid.*, 27.

kemudian disajikan kembali oleh Soepomo didalam bukunya yang berjudul “bab-bab tentang hukum adat”.

Menurut Hazairin, uraian yang diberikan tentang pengertian masyarakat hukum adat relatif cukup panjang, yaitu; “Masyarakat- masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal, atau bilateral*) mempengaruhi sistem permintaannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, pernikahan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah dengan sedikit dengan pemburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana goto royong, tolong menolong, serasa dan semula mempunyai peranan yang sangat besar”.

Prof. Dr. Soepomo, didalam bukunya bab-bab tentang hukum adat menguraikan sebagai berikut; “Bahwa seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan termasuk dunia luar, lahir dan batin, golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran

golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik kedunian dan milik gaib. Golongan- golongan yang demikian itu adalah persekutuan hukum.

Dari beberapa rumusan tentang persekutuan hukum adat ataupun masyarakat hukum adat diatas, maka dapat ditarik suatu pengertian yang cukup sederhana bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah; “Merupakan kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa dan pengurus, mempunyai kekayaan sendiri, baik kekayaan meterial maupun immaterial”.⁶²

2. Faktor- Faktor yang menentukan masyarakat Hukum Adat

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk atau struktur masyarakat hukum adat yang terdapat diseluruh kepulauan Indonesia, maka terlebih dahulu harus mengerti dan memahami faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya masyarakat hukum adat, faktor- faktor tersebut adalah:

- a. Faktor teritorial yaitu faktor dimana terikatnya masyarakat hukum adat tersebut karena merasa memiliki ke daerahan yang sama. Faktor yang mempunyai peranan yang penting dalam tiap timbulnya masyarakat hukum adat,
- b. Faktor genealogis yaitu faktor dimana terikatnya masyarakat hukum adat tersebut karena merasa memiliki keturunan yang sama. Faktor ini mempunyai peranan yang penting dalam tiap timbulnya masyarakat hukum Adat.

3. Bentuk- Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat , ada 2 (dua) penggolongan struktur masyarakat adat, yaitu:

⁶²*Ibid*, 27-29.

a. Masyarakat Hukum adat Teritorial

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya, secara turun-menurun ikatan dengan tanah menjadi ini azaz teritorial⁶³

Meninggalkan tempat tinggal bersama, lingkungan daerah untuk sementara waktu, tidaklah membawa hilangnya keanggotaan masyarakat. Sebaliknya, orang asing (orang yang berasal dan datang dari luar lingkungan daerah) tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menurut hukum adat menjadi anggota masyarakat hukum adat. Mereka akan menjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraya mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnya, berhak ikut serta dalam rukun desa). Supaya dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum adat, maka orang asing berstatus sebaagai pendatang. didalam kehidupan nyata sehari-hari di desa, perbedaan antara penduduk inti dan pendatang kelihatan dengan terang, biarpun dalam suasana desa yang sudah modern. Perbedaan

⁶³Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 23.

tersebut makin lama makin lenyap sesuai dengan keadaan sosial struktur desa.⁶⁴

Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan kedaerahan, mereka bersamasama merupakan kesatuan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Ada tiga bentuk masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu:

1) Masyarakat Hukum Desa

Masyarakat hukum adat desa adalah segolongan atau kumpulan orang yang hidup bersama berazaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun kedalam, masyarakat hukum desa tersebut melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak diluar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut terletak atau duduk. Akan tetapi, mereka tunduk pada penjajah kekuasaan desa dan juga sebagai pusat kediaman, contohnya, desa-desa di Jawa dan Bali.⁶⁵

2) Masyarakat Hukum wilayah (Persekutuan desa)

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkup beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, namun masih juga masyarakat hukum wilayah tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat, hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang

⁶⁴*Ibid.*, 24.

⁶⁵*Ibid.*

lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat hukum wilayah merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasai hutan rimba yang terletak di antara masing-masing kesatuan yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah. Harta benda tersebut baik yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah, yang ditanami maupun yang ditinggalkan atau belum dikerjakan. Contohnya, Kuria di Angkola dan Mandailing, kuria sebagai masyarakat hukum wilayah melingkup beberapa huta, marga di Sumatera Selatan, marga sebagai masyarakat hukum wilayah melingkupi beberapa dusun.⁶⁶

Desa merupakan suatu masyarakat hukum adat yang disebut *Gemeinschaft*, dan berbeda dengan kampung yang merupakan suatu *Gesellschaft*. Kampung di kota-kota besar itu bukanlah masyarakat hukum, karena tidak mempunyai tata susunan yang wajar, dan diantara penduduk-penduduk kampung tidak ada ikatan batin.⁶⁷

3) Masyarakat Hukum serikat desa (Perserikatan desa)

Masyarakat Hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai- bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa tersenut. Kerja sama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa.

b. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota- anggotanya merasa terikat dalam

⁶⁶Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 25.

⁶⁷*Ibid.*, 26.

suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dan laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota- anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan- peraturan hukum (adat) yang sama.⁶⁸

Masyarakat Hukum adat Genealogis Adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari suatu keturunan yang sama.⁶⁹

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan dasarkan keturunan terdapat 4 (empat) macam pertalian keturunan, yaitu:

1) Strukrut Masyarakata patrilineal

Masyarakat Patrilineal yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Sebagai contohnya misalnya; masyarakat adat batak, bali, ambon, dan lampung.⁷⁰ yang ada dikalangan batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan

⁶⁸Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 21.

⁶⁹Zuhraini, *Serba- Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 31.

⁷⁰*Ibid.*, 31.

dengan laki-laki tulung dari si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun menurun.⁷¹

2) Struktur Masyarakat Matrilineal

Masyarakat Matrilineal yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (keibuan). Sebagai contoh misalnya; Masyarakat minangkabau, krici di jambi dan orang semendo di sumatera selatan.⁷² Pada orang Minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.⁷³

3) Struktur Masyarakat parental

Masyarakat yaitu suatu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari garis keturunan pihak laki-laki (bapak) maupun dari pihak perempuan (ibu). Sebagai contoh misal; masyarakat adat jawa, bugis dan dayak.⁷⁴ Pada orang jawa perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudarah sepupu ayah, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari istri kandungnya (yang lebih tau).⁷⁵

4) Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih

Masyarakat Patrilineal Beralih- alih yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti- ganti sesuai dengan

⁷¹Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 96.

⁷²Zuhraini, *Serba- Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 31.

⁷³Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 96.

⁷⁴Zuhraini, *Serba- Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 31.

⁷⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 96.

bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajo-rajo. Contoh, pertalian keturunan demikian terdapat dalam masyarakat rejang lebong, lampung pepadun.⁷⁶

kedua bentuk masyarakat hukum adat yang telah diuraikan diatas, juga ada bentuk masyarakat adat campuran, artinya disamping terbentuk karena faktor teritorial juga karena faktor genealogis. Sebagai contoh misal, *uma* di pulau mentawai, *euri* di pulau nias, *kuria* di huta di tapanuli, *nagari* di minangkabau, marga dan dusun semata selatan.⁷⁷

C. Urf

1. Pengertian Urf

Secara etimologi '*urf* berasal dari kata *arafa*-*ya'rifu*, yang berarti, sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran. Sedangkan menurut terminologi '*urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia yang dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat atau sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik perkataan, perbuatan, atau sekaligus disebut adat.⁷⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf '*urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Menurut Wahbah Al-Zuhailly mendefinisikan '*urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka ataupun lafal

⁷⁶Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 23.

⁷⁷Zuhraini, *Serba- Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 32.

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2001), h. 387.

yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.⁷⁹

Para ulama ushul fiqih mendefinisikan ‘urf sebagai, sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik perkataan perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana ‘urf juga disebut adat istiadat.

2. Landasan Hukum ‘Urf

Landasan hukum ‘urfdijelaskan didalam Al-Qur‘an Firman Allah Swt, yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi) serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf 7: Ayat 199)

Kata *al-‘Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Landasan hukum ‘urf dalam hadist yaitu, Rasulullah SAW. bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah”. (Ahmad)

⁷⁹Wahbah Al- Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999), h. 529.

Maksud dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT. dan sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁰

3. Macam-macam '*Urf*

a. '*Urf* ditinjau dari Sifatnya

Macam-macam '*urf* yang ditinjau dari sifatnya ada 2 yaitu:

1. '*Urf qauli* ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.⁸¹
2. '*Urf amali* ialah '*urf* berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara membolehkannya.

b. '*Urf* ditinjau dari Ruang Lingkupnya

Macam-macam '*urf* yang ditinjau dari ruang lingkupnya ada 2 yaitu:

1. '*Urf al- 'amialah* '*urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.⁸²

⁸⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Semarang: Cipta Karya), h. 112.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2002), h. 390.

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Tangerang: Agung Jaya, 2002), h. 123.

2. *'Urf al-khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak dibiasakan.

c. *'Urf* dilihat dari diterima atau tidaknya

Macam-macam *'urf* yang dilihat dari diterima atau tidaknya ada 2 yaitu:

1. *'Urf* yang *shahih* (baik) adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka, seperti berlaku jujur, sholat 5 waktu dan membayar zakat.⁸³
2. *'Urf* yang *fasid* (buruk) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Mislanya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras (khamr) pada suatu pesta. Sedangkan mengenai kehujjahan *'urf* itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁸⁴

⁸³Ibid., h.124.

⁸⁴Muhammad Abdul Qarib, *Ushul Fiqih II* (Depok: Cipta Karya 2010) h. 76.

4. Syarat-syarat 'Urf

Ada 4 syarat 'Urf yang disebutkan oleh ulama Ushul fiqih yaitu:

1. 'Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat, maksudnya jika hanya kebiasaan sejumlah seseorang maka tidak dikatakan 'urf.
2. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan 'urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
4. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau dalil syar'i prinsip-prinsip syariah.⁸⁵

5. Kehujjahan 'Urf

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan

sebagai sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadist. Adapun kehujjahan 'urf adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT, yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-.,urf) serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf 7: Ayat 199)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu ialah ia yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.⁸⁶

b. Lalu dalam hadist nabi Muhammad SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁸⁵Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Tangerang: Cipta Karya, 2011), h. 154.

⁸⁶*Ibid*, h. 155.

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah”. (Ahmad)

Ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* yaitu kaidah adatu muhakkamah (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ). Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.⁸⁷ Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu masyarakat memaknai suatu kata memiliki makna yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik menurut Islam. Dan begitu seterusnya.

Ulama Hanafiyah mengatakan, *'urf* Itu didahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang tidak ditemukannya *'illah* secara jelas) dan juga di dahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu mentakhsiskan nash yang umum.⁸⁸ Ulama Malikiyah juga demikian, menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.

⁸⁷ Asyayuti, Al-Asbha Waandoir Fi Ma'ruf (Surabaya;Indonesia,tt), h.63

⁸⁸ *Ibid.*, 156.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: LP2M Institut Agama Islam, 2016.

Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaBelajar, 1999.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Renaka Cipta, 1996.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahbab Sayyed, *Fikih Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak*, Jakarta: Remaja Rosda karya, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Ghozali Abdul, Ramhan, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Jami dari Bulughul Maram*, Jakarta: Adz- Dzahabi, 2018.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Muthiah Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007

Mustari pide, Suriyaman *Hukum Adat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.

Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Yulia, *Ajar Hukum Adat* Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, Bandar Lampung: Anugera Utama Raharja, 2018.

Nottingham Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Rofiq Ahmad, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sayyed Hawwas Abdul Azizi Muhammad Azzam, Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahad*: Jakarta: Amzah, 2014.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 1999.

Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bantar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

B. Jurnal

Arios, Leonard Rois, Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantawan Bunting Dalam Suku Bangsa Besemah di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Patanjala*, Vol. 11 No.3,

September

2019.<http://ejournalpatanjala.kemdikbut.ig.id/patanjala/index.php/patanjala/artikel/download/537/pdf>.

Ambar Lukita ningsih, iklan yang efektif sebagai strategi komunikasi pemasaran, *Jurnal: ekonomi dan kewirausahaan* Vol. 13, No.2 oktober 2013.<http://media.neliti.com/media/publications/23468>.

Dian Marhaeni k, Representasi Anak-anak dalam tayangan iklan komperesial di media, *Jurnal Makna* Vol. 1, No.1, Januari 2020.<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/artikel/download/94>.

Mujiburrohman, Kontruksi I'lan Al-Nikah dalam Fiqih Pancasilah, *Ulumuna: Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 3, no.1, Juni 2017.<http://ejurnal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3916/2829>.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Grapika Prss, 2012

D. Wawancara

Budinawi, wawancara dengan tokoh adat, lahat, 22 february 2021.

Yen Hanah, wawancara dengan masyarakat kelurahan kota baru, lahat, 24 February 2021.

Dewi, wawancara dengan masyarakat kelurahan kota baru, lahat, 24 ferbruary, 2021

Hengky, wawancara dengan masyarakat kelurahan kota baru, lahat, 24February2021.

H. Muraman, wawancara dengan tokoh adat, lahat, 22 February, 2021.

Mujiati, wawancara dengan Pengantin, lahat, 25 February 2021.

Mulyadi, wawancara dengan masyarakat kelurahan kota baru, lahat,
24 februari 2021.

Titi Hertani, wawancara dengan Pengantin, lahat, 25,Februari 2021

Sainawi, wawancara dengan pemuka Agama, lahat, 23 Februari 2021.

Ta'jali, wawancara dengan pemuka Agama, lahat, 23 februari 2021.